

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk mencegah dan menurunkan angka stunting dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan serta menerapkan berbagai pengobatan. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut ialah Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015–2019. Meskipun beberapa undang-undang dan peraturan telah diterapkan untuk mengurangi stunting, Indonesia masih mempunyai angka kejadian stunting yang sangat tinggi. Berdasarkan statistik Riskesdas, persentase anak yang mengalami stunting ialah sekitar 36,8% pada tahun 2007 dan 37,2% pada tahun 2013, namun turun menjadi 30,8% pada tahun 2018 setelah mengalami penurunan sebesar 6,4%. (Budiastuti & Rahfiludin, 2019).

Secara keseluruhan presentasinya masih berada pada level tinggi pada tahun 2018, meskipun terjadi penurunan sebesar 6,4%. Misalnya, di Kabupaten Rembang, kebijakan intervensi gizi yang sensitif yang bertujuan untuk mengurangi stunting belum diterapkan seefektif mungkin. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan gizi, program-program tertentu tidak berjalan sebaik yang seharusnya, sehingga menghambat upaya tersebut. dari memiliki pengaruh terbesar dalam menurunkan stunting (Probohastuti, Rengga, & Si, 2019).

Stunting (balita pendek) mewakili masalah pangan yang parah, terutama di negara-negara berkembang dan miskin. Kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, yang dapat terjadi sejak kehamilan hingga usia 24 bulan, dapat menyebabkan

stunting, yaitu sejenis kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan anomali pertumbuhan linear balita. Malnutrisi pada usia dini dapat berakibat fatal, mengganggu perkembangan mental dan fisik anak, meningkatkan angka kesakitan, dan mengganggu pertumbuhan fisik. Balita yang menderita stunting berisiko mengalami gangguan degeneratif di kemudian hari, serta kapasitas intelektual dan produktivitasnya.

Pada tahun 2000, angka stunting mencapai 32,6% di seluruh dunia. Berbeda dengan data tahun 2017, lebih dari 150,8 juta, atau 22,2% balita, mengalami stunting. Dari jumlah tersebut, 55% balita stunting atau 83,6 juta balita berasal dari Asia. Sebaliknya, 39% responden berasal dari Afrika, atau lebih dari sepertiga total responden (Kemenkes RI, 2018).

Peningkatan Gizi (SUN), yang juga dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), harus mendapat prioritas di seluruh dunia dalam kebijakan yang bertujuan menurunkan kejadian stunting hingga anak berusia 24 bulan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan penurunan angka stunting sebesar 3,9% per tahun sepanjang hidup seseorang untuk mencapai penurunan 40% pada tahun 2025. Upaya bersama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sektor komersial, pemerintah, masyarakat sipil masyarakat, dan sektor lain baik di dalam maupun di luar bidang kesehatan diperlukan untuk mendukung gizi yang lebih baik. Hal ini mencakup intervensi sensitif (jangka panjang) dan spesifik (jangka pendek).

Pada bulan Agustus 2020, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting yang menempatkan kegiatan konvergensi di tingkat desa, daerah, dan nasional dengan prioritas tinggi untuk menawarkan kegiatan Intervensi

Gizi Khusus dan Gizi Sensitif pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada anak di bawah umur. usia enam tahun. Perawatan pola makan khusus yang dapat menurunkan stunting pada ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebesar 30% sering dipergunakan oleh sektor kesehatan. Intervensi gizi sensitif, yang menyasar masyarakat umum dibandingkan ibu hamil dan balita pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dilaporkan telah berkontribusi sebesar 70% terhadap penurunan angka kematian ibu dan angka stunting oleh Kementerian Desa, Pembangunan. Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2017). Intervensi ini dimaksudkan untuk menyasar inisiatif pembangunan lain yang tidak terkait dengan sektor kesehatan.

Peraturan Presiden Republik menjadi pedoman program 1000 hari pertama kehidupan manusia yang menjadi dasar percepatan perbaikan gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur upaya peningkatan gizi sejak awal kehamilan hingga anak usia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yaitu Trimester pertama yang berlangsung dari 0 hingga 3 bulan, trimester kedua yang berlangsung selama 4-6 bulan, trimester ketiga, dan keempat yang berlangsung selama 7-9 bulan, meliputi empat kali screening (pemeriksaan ): pemberian makanan tambahan (PMT), kucing bunting, vaksinasi, dan pemberian pil penambah darah. Memastikan bahwa wanita tersebut mendapat gizi yang baik sebelum dan selama kehamilannya, dan bahwa dia tidak menderita anemia atau menderita defisit energi kronis (CED). Wanita hamil sebaiknya mengonsumsi makanan tinggi nutrisi dalam jumlah sedikit, namun hal ini biasanya lebih baik karena memperbanyak asupan buah dan sayuran. Ketika seorang wanita memasuki

trimester ketiga kehamilannya, ia harus melaksanakan pemeriksaan rutin. Ada baiknya juga bagi suami untuk belajar tentang menyusui dan memberikan informasi kepada ibu hamil mengenai posisi, teknik, dan manfaat menyusui yang benar, serta cara menangani segala permasalahan yang mungkin timbul.

Semua bayi baru lahir atau bayi harus mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) selama periode 0–6 bulan. Dengan hanya mempergunakan ASI dan memantau perkembangannya secara rutin, pemberian ASI eksklusif membantu ibu dalam mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama menyusui. Sangat penting untuk memastikan ibu memahami berbagai jenis makanan dan kapan harus memberi makan anaknya selama periode enam hingga dua puluh empat bulan. Mulailah dengan makanan yang dihancurkan atau cair (6–8 bulan), diikuti dengan makanan lunak/semi padat dan lembek (8–12 bulan), dan makanan padat (12–24 bulan) untuk membantu ibu tetap menyusui bayinya hingga saat ini. Seorang ibu harus mengetahui cara menyiapkan dan memilih makanan yang kaya nutrisi, serta cara sering memeriksa kesehatan dan tumbuh kembang anaknya.

Mendorong masyarakat untuk hidup dalam masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat ialah tujuan dari penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang akan membantu tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang sebaik-baiknya. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat menyatakan hal yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat pelaksanaan berbagai inisiatif kesehatan, penyertaan sudut pandang kesehatan di sektor lain, dan tindakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sumber daya manusia yang layak secara sosial dan ekonomi.

Masalah gizi paling umum yang dihadapi Indonesia ialah prevalensi stunting atau balita pendek. Berdasarkan statistik Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun sebelumnya, angka kejadian balita pendek merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti obesitas, gizi buruk, dan wasting. Balita stunting merupakan 29,0% dari populasi pada tahun 2015, 27,5% pada tahun 2016, dan 29,6% dari populasi pada tahun 2017 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Namun, terdapat fluktuasi dalam kejadian ini. Selain itu, menurut statistik Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), persentase stunting pada anak Indonesia dengan status gizi pendek dan sangat pendek turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018).

Langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi harus diambil untuk mencegah dan menangani stunting. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu dari beberapa sektor yang terlibat dalam rencana Scaling Up Nutrition (SUN) yang memerlukan koordinasi yang kuat di tingkat pusat dan daerah. Agar kondisi gizi masyarakat membaik, maka tingkat struktural harus mampu memotivasi dan menjelaskan tindakan. masyarakat, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan, informasi harus disebarluaskan, advokasi harus dilakukan kepada pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan lainnya di sektor lain pada tingkat yang sama. Penguatan tambahan diberikan kepada 1000 HPK yang sudah tertanam kuat dalam tatanan sosial masyarakat. Para ibu yang ingin membantu tumbuh kembang janinnya pada trimester pertama kelahirannya ditawarkan kursus singkat sains dan pendidikan sebelum hamil atau sebelum menjadi calon pengantin (Aryastami, 2017).

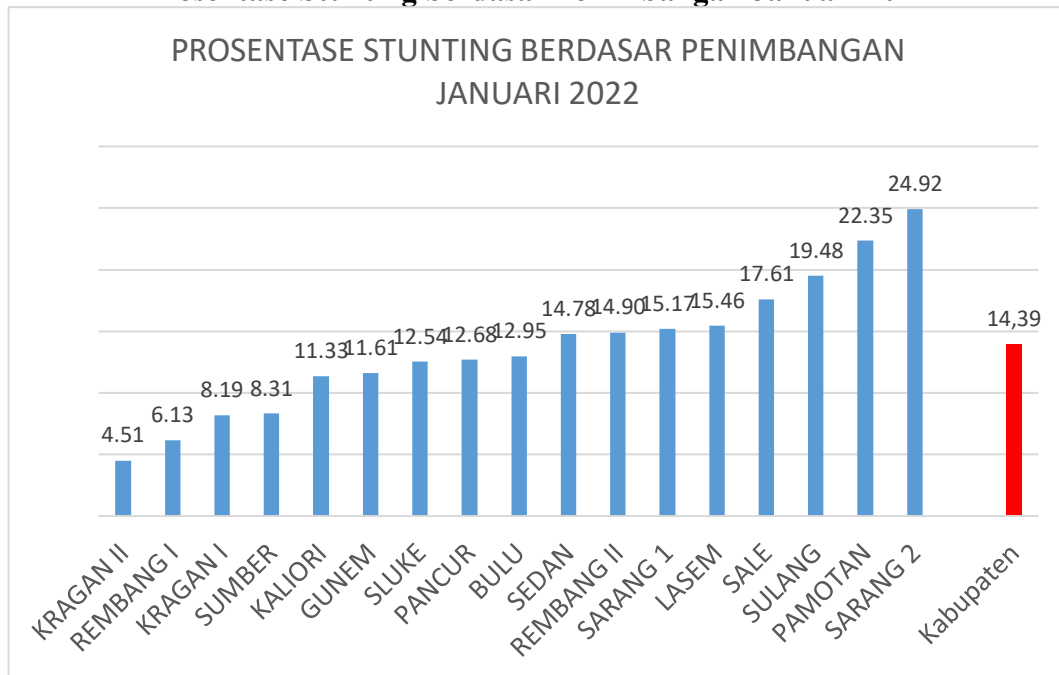
**Tabel 1.1**  
**Prevalensi Balita Stunting Jawa Tengah 2021**



Sumber : e-PPGBM (didownload tgl 3 Januari 2021)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa angka stunting di Kabupaten Rembang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan wilayah disekitarnya seperti Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Bagi pemerintah pusat dan daerah, salah satu tantangan utama yang terus mereka hadapi ialah penerapan langkah-langkah pencegahan stunting yang relevan. Diantaranya ialah rendahnya koordinasi antar OPD (Yusran dkk., 2021), tantangan terkait penerapan konvergensi regional dalam pencegahan stunting (Iqbal dan Yusran, 2021) dan serangkaian skenario yang menunjukkan korelasi signifikan dalam perubahan kebijakan yang berdampak pada ketidakseimbangan hubungan fungsional antara kebijakan pangan, ekosistem alam, dan prevalensi stunting. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mempertimbangkan fakta bahwa masih terdapat kesulitan dalam menerapkan sistem pemantauan untuk menghindari stunting.

**Tabel 1.2**  
**Prosentase Stunting berdasar Penimbangan Januari 2022**



Tabel data di atas membuktikan bahwa angka stunting di Kabupaten Rembang masih tinggi, bahkan melebihi angka kasus di beberapa daerah. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan tingkat kecamatan mulai sumber daya manusia, pola hidup, dan kurangnya koordinasi antara lintas sektor yang ada dalam penanganan penurunan angka stunting. Masih sulitnya masyarakat menyadari bahwa beberapa pola hidup yang mereka jalani dapat meningkatkan risiko bayi terlahir dengan kondisi stunting, seperti kurangnya perhatian pemerintah pada ibu yang beresiko, merokok, tidak memeriksakan kehamilannya, dan tidak makan makanan yang bergizi.

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional (RAN-PG) telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017

mengenai Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, yang memvalidasi terciptanya pembangunan pangan dan gizi yang bermutu dan sumber daya manusia yang berdaya saing. Selain itu, Perpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) berpotensi meningkatkan pendidikan gizi tentang keseimbangan gizi dan ketersediaan pangan bergizi, serta mempercepat kemajuan gizi.

Malnutrisi pada anak dapat disebabkan oleh berbagai macam keadaan. Penyebabnya bermacam-macam, antara lain karena faktor lingkungan seperti domisili dan lingkungan sekitar, kemiskinan, penyakit, diare, batuk, dan masalah bawaan. Berbagai inisiatif diluncurkan pada tahun 2019, salah satunya ialah inisiatif kelompok kerja tingkat desa untuk mengatasi gizi. Hal ini memungkinkan pemerintah mengurangi angka stunting sejumlah 33 %. Berdasarkan data lapangan dan banyaknya informasi masyarakat yang menderita stunting, masih terdapat sejumlah desa di Kabupaten Rembang yang menjadi sentra status stunting tinggi. Hal ini membuktikan bahwa masih perlunya pelaksana untuk menangani kasus stunting secara hati-hati karena distribusinya yang kurang ideal.

Kabupaten Rembang menjadi Kabupaten lokus stunting di Jawa Tengah Pada Tahun 2020 dengan jumlah 17,67% bayi yang lahir stunting dan bertambah pada tiga tahun terakhir. Selain itu fasilitas kesehatan yang belum dimanfaatkan dengan baik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kembang tumbuh janin yang dikandung. Menindaklanjuti tingginya angka stunting di Kabupaten Rembang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang mengembangkan pendekatan inovatif untuk menurunkan



stunting. Inisiatif pemerintah tidak dilaksanakan dengan cara terbaik bagi masyarakat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang”. Peneliti melaksanakan penelitian yang bersifat analisis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat dengan mempergunakan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaan berikut dimanfaatkan guna memperjelas rumusan masalah :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Rembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Rembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Rembang.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam evaluasi Kebijakan Stunting di Kabupaten Rembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Program penurunan stunting, riset ini merupakan prosedur pembelajaran guna membantu seseorang memahami serta berpikir seperti suatu sistem sambil menganalisis inisiatif pemerintah.

## 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait agar dapat mengatasi hambatan yang muncul dalam menilai kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Rembang.

## 3. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan tentang kebijakan program yang dilaksanakan guna Penanganan Stunting di Kabupaten Rembang.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya mengembangkan riset yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan memiliki beberapa teori yang beragam. Beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti tidak memiliki kesamaan dari segi judul seperti judul penelitian ini. Selain sebagai perbandingan, peneliti menganalisis penelitian terdahulu dengan tujuan agar referensi dalam mengkaji topik penelitian ini dapat lebih berkembang. Penelitian ini memanfaatkan sejumlah penelitian terdahulu sebagai referensi.

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
1.	Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada	Risk Factors for Stunting in Toddlers in Developing Countries	Qurratu Falmuariat, Thresya Febrianti,	Salah satu faktor risiko terjadinya stunting pada anak di negara berkembang ialah berat badan lahir yang juga berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Lebih lanjut, perbandingan dengan kelompok kontrol membuktikan bahwa balita pada kelompok kasus dengan berat badan lahir rendah

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
			Mustakim Mustakim	mempunyai risiko 2,15 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami stunting. Berdasarkan hasil yang sama, jika balita pada kelompok kasus tidak mendapatkan ASI eksklusif, peluangnya mengalami stunting 2,97 kali lebih tinggi dibandingkan balita pada kelompok kontrol.
2.	Jurnal Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI DI KECAMATAN TANGSE ( Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh.	Irwanda	Data pemantauan dan evaluasi membuktikan bahwa meskipun sebagian besar inisiatif telah berjalan dan mencapai tujuannya, inisiatif lain, termasuk Rumah Pangan Berkelanjutan (RPL) dan Program Rumoh Gizi Gampong Terpadu (RGG), belum mencapai tujuan. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting, Kabupaten Tangse terus mengawasi kegiatan posyandu dan memberikan makanan tambahan (PMT) sesuai kebutuhan gizi setiap balita.
3.	FISIP JOURNAL Universitas Medan Area.Com	STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN	Dhea Jayanti Wardahi, M.AP	Sebagai bagian dari upaya memerangi stunting, Kabupaten Medan Timur mengembangkan inisiatif D'GINTING. Pemberian makanan tambahan, vitamin, susu, obat-obatan, sosialisasi, konseling, serta pemeriksaan tinggi dan berat badan secara berkala hanyalah beberapa kegiatan dalam program D'GINTING yang bertujuan untuk meningkatkan gizi balita stunting. Program ini berlangsung selama tiga bulan dan hanya dilaksanakan selama empat belas hari per bulan. Permasalahan utama yang menghambat pencegahan stunting di Kecamatan Medan Timur ialah kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya infrastruktur dan fasilitas. Kelanjutan program D'GINTING tidak berjalan sesuai jadwal karena tiga hal

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
				tersebut. Para pekerja di Pemerintah Kabupaten Medan menyumbangkan uang yang dimanfaatkan guna menjalankan inisiatif D'GINTING.
4.	Journal Of Policy, Governance Development and Empowerment	VALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI PASAMAN BARAT	Gusmiati, Rahmadani Yusran	Dari sisi pencegahan dan penurunan stunting, program pencegahan stunting yang dilaksanakan di Pasaman Barat belum membuktikan hasil yang baik. Dampak dari setiap orang yang memiliki akses terhadap pangan padat gizi, setiap orang, terutama mereka yang berada pada kelompok rentan gizi, dan setiap orang yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan gizi, semuanya dapat dimanfaatkan guna membuktikan hal ini. Namun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 yang menguraikan tujuan perbaikan gizi belum tercapai. Indikator utama masukan, proses, keluaran, dan hasil yang diuraikan oleh Bridgman & Davis harus dipertimbangkan ketika pemerintah menilai kebijakan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan mencakup efektivitas dan efisiensi metode transformasi, hasil atau produk, dan dampak penerapannya.
5.	Journal of Civic Education	Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	Dian Permata Sari, Rahmadani Yusran	Efektivitas implementasi kebijakan di Kenagarian Pulakek Koto Baru dalam menurunkan stunting belum sepenuhnya dievaluasi. Buruknya pelaksanaan pemantauan gizi di bidang medis menjadi buktinya. Kedua, terbatasnya cakupan program yang dilaksanakan karena kurangnya peraturan daerah khusus mengenai stunting merupakan tanda bahwa pendekatan pemerintah yang tidak konsisten terhadap pencegahan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain menurunnya minat masyarakat terhadap upaya pencegahan, penyebab ketiga ialah kurangnya kreativitas pemerintah daerah. Kurangnya pendidikan juga menghambat pemahaman dan pengetahuan masyarakat. 4. OPD dan lembaga tidak saling membantu dalam

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
				<p>pengecahan stunting. 5. Dinas Ketahanan Pangan yang berpendapat bahwa Dinas Kesehatan seharusnya menangani permasalahan terkait stunting dan hanya berkonsentrasi pada permasalahan kerawanan pangan secara keseluruhan. Pelaksanaan pencegahan stunting masih di bawah standar karena sumber daya tenaga kesehatan tidak mencukupi dan alokasinya tidak merata. Tujuan kebijakan belum tercapai akibat permasalahan ini.</p>
6.	<p>Jurnal Administrasi Publik Universitas Makasar</p>	<p>EVALUASI STRATEGI MENEKAN LAJU PENDERITA STUNTING DI KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>Dwi Danti Fitria</p>	<p>Tindakan korektif harus diambil untuk menjamin bahwa program, kebijakan, dan strategi yang diterapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan organisasi, dan tanpa adanya penyimpangan dalam sistem Administrasi dalam evaluasi saat ini.</p>
7.	<p>Journal of Development Policy</p>	<p>Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia</p>	<p>Latifa Suhada Nisfa</p>	<p>Berbagai peraturan dan regulasi yang bertujuan untuk mencegah stunting sudah ada di Indonesia dan berbentuk intervensi yang sensitif dan tepat sasaran. Meskipun intervensi sensitif mencakup memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi, sektor kesehatan melaksanakan intervensi spesifik dengan berkonsentrasi pada inisiatif 1000 Hari Pertama Kehidupan. Stunting telah dikaitkan dengan variabel sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, dan kemiskinan serta masalah kesehatan. Diperlukan kerja sama lintas sektor dan eksekusi yang ekstensif untuk mengatasi stunting. Peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pusat juga harus dipantau di tingkat regional dan lokal, termasuk tidak hanya di sektor kesehatan tetapi juga sektor terkait lainnya. Karena tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi mengenai manfaat lingkungan yang bersih, pola makan seimbang, dan praktik higienis sangat penting untuk menurunkan angka stunting,</p>

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
				maka terdapat kebutuhan untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pencegahan berbasis masyarakat.
8.	Unnes Journal of Public Health is Nationally Accredited	Evaluasi Penatalaksanaan Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sirampog	Hikmatur Qoiroh	Ibu hamil yang melaksanakan kunjungan ANC pada kunjungan Q1 dan K4 mencakup 95,6% dan 83,5% ibu hamil yang menyatakan bahwa program sehat yang bertujuan menurunkan stunting pada anak berjalan dengan sangat baik. Fakta bahwa 86,8% bayi baru lahir mempergunakan ASI eksklusif pada tahun 2015 menjadi bukti bahwa upaya penurunan stunting pada balita berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya 86,8% kehadiran bayi baru lahir dan balita untuk pemantauan tumbuh kembang, inisiatif pemantauan tumbuh kembang balita terkait dengan penghapusan stunting pada balita berjalan dengan sangat baik. Bidan di desa tersebut selanjutnya mengukur tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) anak setiap bulan dan setiap tahun pada waktu yang sama.
9.	Scientific Repository	Studi Evaluasi Kebijakan dan program Penurunan Stunting	Ilham Nugraha, M.AP	Metode utama untuk rumah tangga berpendapatan rendah di klaster ini ialah Bantuan Pangan Non Tunai (NCFA). Salah satu capaian program ini ialah memperluas variasi pangan yang dikonsumsi keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan keahlian lokal. Nasihat gizi orang tua atau pengasuh tentang kebiasaan makan, teknik pengasuhan kognitif, dan stimulasi dini merupakan beberapa perawatan sensitif dalam kelompok lingkungan sosial yang harus diterapkan sesegera mungkin. Penting untuk meningkatkan kompetensi dan fungsi kader sebagai pekerja sosial agar dapat mendukung inisiatif ini secara efektif. Penetapan prioritas kesehatan dan lingkungan untuk menjamin akses terhadap air dan sanitasi yang memadai merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan dua intervensi sebelumnya, karena terdapat bukti substansial mengenai efektivitas praktik-praktik ini di negara-negara

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
				berkembang. Beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia, antara lain Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara, memiliki nilai indeks stunting (SI) yang rendah, berdasarkan temuan pemodelan indeks stunting. Selain itu, yang berkontribusi terhadap rendahnya nilai indeks ialah faktor penelitian dari Pilar Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan dalam SDGs. Akses terhadap makanan sehat, sanitasi yang layak, dan fasilitas air bersih terbatas di Indonesia karena rendahnya posisi sosial ekonomi keluarga baik di perkotaan maupun pedesaan.
10.	Jurnal Manajemen Pelayanan Publik	Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems	Sulaiman Zuhid	Kebijakan publik dan hambatan tata kelola menjadi topik perdebatan utama dalam kajian administrasi publik. Masalah utamanya ialah tidak memadainya kebijakan-kebijakan terkait. Untuk menghindari stunting, para pemangku kepentingan mempunyai tanggung jawab untuk mengakomodasi bantuan sumber daya dari sektor komersial, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Oleh karena itu, subjek ini terhubung dengan aspek-aspek yang paling banyak dieksplorasi dalam implementasi dan penilaian kebijakan stunting. Prospek penelitian meningkat karena perlunya tata kelola kolaboratif yang berguna. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, implikasi penelitian ini memberikan saran untuk memperbaiki tata kelola dalam bidang penanganan stunting. Potensi penelitian mencakup mengkaji kerangka kerja sama yang lebih efisien dan model kelembagaan untuk menyelidiki kebutuhan tata kelola kolaborasi. Oleh karena itu, dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya dapat diatasi.
11.	Jurnal Bina Desa	Upaya Pencegahan Stunting di Desa Sendangmulyo Berbasis Edukasi dan Sosialisasi	Ayu Wulandari dan Fauzan Amrulloh	Balita yang mengalami stunting, yang merupakan masalah gizi jangka panjang, sering kali memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan balita lainnya. Stunting merupakan masalah serius yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
		pada Remaja dan Ibu dan Anak Terdampak Stunting		karena berdampak negatif terhadap kemampuan anak dalam menyerap pengetahuan. Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 membuktikan prevalensi 27,68 persen di Jawa Tengah; Namun, pada tahun 2021, data yang sama membuktikan penurunan yang cukup besar hingga 20,9 persen. Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Rembang penulis menyelesaikan pengabdian masyarakat. Salah satu tujuannya ialah mengangkat isu stunting.
12.	Indonesia of public Journal Healty and Nutrision	Analisis Karakteristik dan Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kunjungan Bayi Lahir Stunting di Puskesmas Se-Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang	Fiki Hidayati , Bambang Budi Raharjo	Hasil penelitian membuktikan bahwa kepuasan pasien berkorelasi signifikan ( $p$ value $<0,05$ ) dengan karakteristik gender dan status berat badan lahir rendah (BBLR), namun tidak berkorelasi signifikan ( $p$ value $> 0,05$ ) dengan karakteristik pendidikan. Pasien dirujuk ke Puskesmas Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang, untuk mendapatkan pelayanan terkait bayi lahir stunting. Terdapat 49 responden atau 81,7% dari total responden yang menyatakan biasanya senang dengan pelayanan yang diberikan. Sisanya sebesar 18,3% responden menyatakan ketidakpuasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien saat menjenguk bayi stunting yang lahir di Puskesmas di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ialah: bukti fisik (tangible), jaminan (assurance), empati (emphaty), keandalan (reability), dan daya tanggap dalam pelayanan ini.
13.	Jurnal Pengabdian Masyarakat UNSIQ	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita	Ike Purnamasari, Fitri Widiyati, Muhamad Sahli	Faktor risiko utama penelitian yang merupakan faktor penyebab tidak langsung terjadinya stunting inilah yang menjadi alasan mengapa perlu dilakukan upaya pencegahan stunting. Upaya tersebut antara lain menaikkan usia pendidikan hukum menjadi 12 tahun, meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil sehingga tersedia fasilitas kesehatan, dan mencegah terjadinya bayi berat lahir rendah melalui berbagai upaya preventif dan promosi.



No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
14.	Jurnal Nasional UNIMUS	Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Pancur Kabupaten Rembang Balita Stunting Usia 2-5 Tahun	Shofia Ulfiani, M.Kes dan Nuke Devi Indrawati, M.Kes	Berdasarkan data yang dikumpulkan dari fasilitas kesehatan setempat, terdapat 22 penduduk, jumlah yang cukup besar, yang menderita stunting. Oleh karena itu, karena stunting dan anemia masih saling berkaitan, maka penulis bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Pancur untuk melaksanakan inisiatif sosialisasi. Penulis berharap dengan adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang stunting maka angka kejadian stunting di Desa Sendangmulyo dapat menurun.
15.	Semnas Article Proceeding Unnes	Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Daun Kelor dan Ikan Laut Terhadap Kadar Zinc Serum Balita Stunting di Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2022	A. Yuniasuti, AD Safarina, Nugrahannugsih	<p>Sebagian besar balita mengalami defisiensi seng sebelum intervensi makanan tambahan berbahan dasar ikan laut dan daun kelor, dengan 70% mengalami defisiensi seng dengan 30% mengalami kekurangan seng sedang dan 70% mengalami kekurangan seng parah. Setelah intervensi, profil tingkat zinc anak-anak meningkat secara dramatis, dengan hanya 4% yang membuktikan defisit berat, 76% membuktikan defisiensi ringan, dan 20% membuktikan defisiensi sedang. Hal ini membuktikan bahwa pemberian ikan laut dan daun kelor sebagai nutrisi tambahan dapat meningkatkan kadar zinc serum anak stunting di Puskesmas Sedan Kabupaten Rembang.</p> <p>Sebelum adanya intervensi, sebagian besar balita mengalami stunting 10% diantaranya sangat pendek (stunting), dan 90% mempunyai perkembangan tinggi badan di bawah rata-rata. Ada peningkatan yang nyata dalam tinggi badan setelah intervensi, meskipun beberapa orang masih menderita stunting. Sekitar 64% balita mengembangkan tubuhnya hampir standar, 3% tetap sangat pendek (sangat kerdil), dan 33% mencapai status tinggi badan normal. Hal ini membuktikan bahwa pemberian makanan tambahan berbahan dasar ikan laut dan daun kelor kepada anak stunting di Puskesmas Sedan, Kabupaten Rembang,</p>

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
				dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi badan mereka.
16.	Journal Pengabdian Kesehatan	Penerapan Metode Door To Door Dalam Pendampingan Gizi Balita Stunting di Desa Pamotan Kecamatan Rembang	Ervi Rahma, M. Husni Mubarok, Devi Febrian	Faktor risiko stunting antara lain berat badan lahir, makanan tambahan, ASI eksklusif, status gizi, dan lingkungan bersih. Dalam proyek penjangkauan masyarakat ini, Sesi pendampingan diberikan kepada ibu-ibu dari anak stunting di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi tersebut, pemberian ASI eksklusif, dan pendamping pemberian ASI.
17.	Biologi Journal & Artical Unnes	Analisis Hubungan Asupan Seng Dengan Kejadian Stuning Pada Balita Di Puskesmas Sedan Kabupaten Rembang	A Yuniastuti	Skor z TB/U tidak mengkorelasikan variabel penyebab dengan konsumsi seng harian. Prevalensi stunting pada balita dan asupan zinc tidak berkorelasi nyata ( $p=0,131$ ) di wilayah kerja Puskesmas Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Berdasarkan pemeriksaan data asupan zinc feeding recall 1x24 jam, koefisien korelasi kedua variabel agak kecil, $r = 0,282$ .
18.	Public Journal & Development	Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah	Liza Diah Ayu Rosanti	Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dari 24,97% pada tahun 2020 menjadi 11,8% pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di kabupaten ini telah menurun, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 11,14%. Kabupaten Rembang akan mengalami stunting 0% jika keempat indikator berfungsi sebagaimana mestinya.

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
19.	Eprints Articaly Walisongo	Hubungan Pengetahuan Ibu, Pendidikan, dan Pola Asuh Pemberian Makanan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	Ummi Latifah	Frekuensi kejadian stunting pada balita di Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang berhubungan dengan pengetahuan ibu ( $p=0.00$ , $OR=2.00$ ). Di Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tidak terdapat hubungan ( $p=0,70$ ) antara prevalensi balita stunting dengan pendidikan ibu. Tidak terdapat hubungan antara frekuensi anak stunting dengan pola asuh orang tua di Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang ( $p=1,00$ )
20.	JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)	Pengelompokan Kabupaten/Kota di Indonesia Berdasarkan Faktor Penyebab Stunting Pada Balita Menggunakan Algoritma K-Means	Alia Fadilah, Mohammad Nurfaizy	Wilayah data transaksi berisiko tinggi dimasukkan dalam pengelompokan K-Medoids. Rata-rata dibutuhkan satu menit 38 detik untuk menyelesaikan algoritma K-Medoids. Kabupaten dan kota di Indonesia dikelompokkan menggunakan algoritma k-means sesuai dengan karakteristik yang berkontribusi terhadap balita stunting. Ciri-ciri dan isu-isu yang ada pada masing-masing klaster menginformasikan pengembangan strategi yang tepat yang bertujuan untuk menurunkan kejadian stunting pada anak balita.
21.	Jurnal ITB Semarang	Sistem Informasi Geografis Sebaran Stunting dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Aldi Widodo	Analisis mengungkapkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan jangka panjang termasuk stunting. Langkah proaktif pemerintah untuk mengatasi dampak ganda penyakit ini termasuk proyek distribusi stunting dan inisiatif pengentasan

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
				kemiskinan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.
22.	Journal Nusantara	Yuwanita Nurhayati	Analisis Faktor Yang Berkaitan Dengan Kinerja Kader Posyandu : Studi Pada Kelompok Kader Posyandu di Wilayah Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang	Efektivitas kader posyandu dalam menangani stunting di Kecamatan Pamotan sangat bergantung pada seberapa baik informasi tersebut diimplementasikan dan seberapa baik masyarakat menerima cara sosialisasinya. Mereka mendekati tujuan satu per satu dengan mempergunakan teknik jemput bola yang memakan waktu lama namun lebih efisien dibandingkan melaksanakannya secara berkelompok.
23.	Journal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pulomerak dalam Penurunan Stunting Melalui Posyandu Keliling	Arta Rusidarma Putra, Irma Nurmala Dewi, Leni Triana	Antusiasme peserta yang sangat besar dan dukungan dari ibu anak serta kader membuktikan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi door to door berjalan dengan baik. Proses penelusuran dan penilaian terhadap pencapaian kegiatan program yang sesuai dengan harapan dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dari para pemangku kepentingan terkait.
24.	Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada	Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita di Negara Berkembang	Thresya Febrianti	Angka kelahiran bayi stunting cukup tinggi di negara-negara terbelakang seperti Indonesia. Variabel risiko terhubung ke Di negara-negara miskin, berat badan lahir rendah dan kualitas ASI yang buruk merupakan penyebab utama stunting pada anak. berat

No	JURNAL (1)	JUDUL (2)	PENULIS (3)	HASIL/TEMUAN (4)
				Ciri menonjol lainnya pada bayi baru lahir yang terlahir kerdil ialah berat badan lahir rendah.
25.	Risk Factors of Stunting in Toddlers 24-59 Month in Rembang Regency Indonesia	South East Asia Nursing Research	Galuh Ramaningrum, Aisyah Lahdji	Faktor risiko stunting antara lain jumlah energi dan protein yang dikonsumsi, jumlah anggota keluarga, lamanya waktu eksklusif untuk menyusui, riwayat makanan tambahan, dan kebersihan lingkungan. Latar belakang makanan gratis ialah elemen pendukung utama. Anak-anak dengan konsumsi kalori dan protein yang buruk juga mungkin mengalami kasus stunting. Stunting pada anak dapat dihindari dengan mengonsumsi makanan yang beragam, terutama yang kaya kalori dan protein.

*Sumber : Diolah oleh peneliti dan diambil dari berbagai sumber jurnal*

Penelitian pada Tabel 1.3 memberikan penjelasan tentang penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal. Setelah menganalisis banyak publikasi yang mendukung penelitian ini, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa terdapat hal baru, perbedaan, dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Kelima aspek kualitas pelayanan merupakan kesamaan antara riset ini dengan riset sebelumnya, yaitu tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (perhatian individu).

## **1.5.2 Teori Administrasi Publik**

### **1.5.2.1 Definisi Administrasi Publik**

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Sukidin, 2009:21), ialah proses pengorganisasian dan koordinasi staf dan sumber daya dari

pemerintah dalam rangka menciptakan, melaksanakan (manage), dan mengawasi pilihan kebijakan publik.

Prajudi Atmosu (dalam Syafiie, 2006: 24) menggambarkan administrasi publik sebagai suatu administrasi yang berfungsi untuk memenuhi tujuan negara melalui organisasi dan manajemen. Gagasan ini berpendapat bahwa administrasi ialah suatu kesatuan pemerintahan yang berupaya mencapai tujuannya guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Felix A. dan Lloyd G. Nigro (dalam Sukidin, 2009:10) menyatakan bahwa administrasi publik ialah

*“Cooperation in a public environment, a wide focus that encompasses the legislative, executive, and judicial departments of government and their interactions, and a crucial role in establishing public policy are characteristics of the area of public administration, involvement in the political process, partnerships with numerous private organizations and individuals to deliver community services, and notable distinctions from the field of private administration.”*

Nigro bersaudara mendefinisikan administrasi publik sebagai kerja sama kolektif dalam lingkungan pemerintahan. Administrasi publik mencakup cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta keterkaitannya. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari proses demokrasi karena memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan publik. Meskipun pemberian layanan kepada masyarakat sangat erat kaitannya dengan sejumlah organisasi swasta dan masyarakat, administrasi publik berbeda dari administrasi individu dalam beberapa hal.

George J. Gordon (dalam Syafiie, 2003: 3) mengartikan administrasi publik mengacu pada tindakan kolektif lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam penerapan atau pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh cabang eksekutif dan yudikatif pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa administrasi publik ialah kumpulan upaya kerja sama yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan secara efektif dan efisien melayani kebutuhan masyarakat.

#### **1.5.2.2 Paradigma Administrasi**

Henry (dalam Subarsono 2013:31) menyatakan bahwa konsentrasi dan lokus merupakan salah satu syarat suatu bidang keilmuan. Fokusnya ialah menantang pendekatan ilmiah yang dimanfaatkan guna mengatasi suatu masalah. lokus menjelaskan kemungkinan penerapan prosedur tersebut. Menurut Henry, administrasi publik terbagi menjadi enam paradigma, yaitu sebagai berikut:

**Paradigma 1 (1900-1926)** Paradigma pertama disebut sebagai divisi yang memisahkan pemerintahan dari politik. Dua tokoh terkemuka dalam paradigma ini ialah Frank J. Goodnow dan Leonard D. Pada tahun 1900, administrasi bertugas melaksanakan kemauan atau kebijakan rakyat, sedangkan politik harus fokus pada kebijakan atau perwujudan kemauan tersebut.

**Paradigma 2 (1927-1937)** Hal ini disebut dengan paradigma prinsip administrasi. Wiloughby, Gullick dan Urwick serta Fayol & Taylor ialah karakter dalam paradigma ini. Mereka menetapkan prinsip-prinsip administrasi sebagai bidang studi utama dalam administrasi publik. POSDCORB (Planning,

Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting ) merupakan kawasan dimana konsep-konsep administrasi terbentuk.

**Paradigma 3** (1950-1970) dimana Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik ialah istilah yang dimanfaatkan guna menggambarkan paradigma ini. Morstein Marx ialah personifikasi dalam paradigma ini. Marx berpendapat bahwa politik dan administrasi tidak mungkin dipisahkan, sementara Herbert Simon mengkritik teori manajemen karena tidak konsisten dan tidak universal.

**Paradigma 4** (1956-1970) Ilmu Administrasi Administrasi Publik. Dasar-dasar manajemen diperluas lebih lanjut dalam paradigma ini. Analisis sistem, analisis manajemen, dan perilaku organisasi merupakan bidang penekanan utama dalam paradigma ini.

**Paradigma 5** (1970-1990) Administrasi Publik ialah nama yang diberikan untuk paradigma ini. Paradigma ini berpusat pada kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi, dengan birokrasi pemerintah serta permasalahan dan permasalahan publik sebagai titik gravitasinya.

**Paradigma 6** (1990- Sekarang ) Paradigma ini, yang dikenal dengan istilah Governance, memusatkan pengelolaan publik pada konsep tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan. Munculnya pemerintahan demokratis yang tertib, transparan, higienis, dan berwibawa merupakan wujud pemerintahan yang baik.

Penulis penelitian ini fokus pada administrasi publik yang merupakan paradigma kelima, berdasarkan paradigma satu sampai enam. Karena paradigma ini sangat menekankan pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berupaya mengatasi permasalahan dan mengutamakan kepentingan masyarakat



umum. Paradigma yang ada saat ini, yang menyatakan bahwa lembaga publik harus mampu melayani masyarakat secara sukses di segala bidang, khususnya bidang kesehatan, sangat selaras dengan lokasi dan subjek penelitian ini.

### *1. New Public Administration (NPA)*

Anggriani Alamsyah menyebut “Keadilan Sosial” karya Frederickson sebagai konsep sentral NPA. Konsep keadilan sosial mencakup makna kumpulan keputusan nilai, seperti pemilihan gaya manajemen dan struktur organisasi. Keberhasilan membangun keadilan dapat diukur dari beberapa faktor, antara lain perubahan mekanisme dan prosedur tanggap yang sebelumnya lamban merespons, kemampuan kelompok perangkat daerah untuk bereaksi cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, anggaran yang diperlukan untuk menjamin daya tanggap, dan perubahan perilaku birokrat menuju lebih responsif. Keberhasilan penerapan pembangunan keadilan juga memerlukan pemimpin yang dapat memfasilitasi perubahan yang responsif, dukungan politik terhadap kemajuan teknologi, dan mekanisme yang responsif.

### *2. New Public Management*

Tujuan keseluruhan dari New Public Management ialah untuk meningkatkan kinerja administrasi publik dengan memasukkan ide-ide dari sektor komersial. Hood (1991) dan Aucoin (1993) mendefinisikan NPM sebagai “deregulasi saluran manajemen, relokasi departemen pelayanan publik ke dalam organisasi mereka sendiri atau ke perusahaan akuntabilitas berbasis kinerja, dan penggunaan mekanisme

kompetitif seperti pasar internal dan kontrak eksternal, meskipun tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan NPM dan apa yang bukan”.

### 3. *Administrasi New Public Service*

Menurut definisi Anggriani Alamsyah tentang Administ Administrasi *New Public Service* dalam jurnal politik produktif Paradigma, masyarakat kini memegang posisi sebagai pemilik pemerintah (*owners of government*) dan dapat berkolaborasi untuk memperbaiki keadaan. Kepentingan publik kini dilihat sebagai hasil partisipasi dan wacana publik dalam mencari kepentingan bersama dan nilai-nilai bersama, bukan sebagai kumpulan kepentingan individu. Menurut paradigma *new public service*, tugas penyelenggara publik sebagai pelayan publik antara lain melayani masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pemerintahan. Administrator publik memahami bahwa ada beberapa tingkat akuntabilitas, etika, dan tanggung jawab yang rumit dalam masyarakat demokratis ketika mereka menjalankan tanggung jawabnya.

Berdasarkan paradigma sebelumnya, penulis mengadopsi paradigma ketiga, Paradigma *New Public Service*, yang membahas peran keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dalam kebijakan publik.

Administrasi merupakan kegiatan dan perbuatan yang terkait dengan penerapan aturan untuk mencapai tujuan. Dalam arti sempit, administrasi mengacu pada tugas-tugas teknis seperti pencatatan, penulisan, pembukuan

ringan, pengetikan, agenda, dan sebagainya. Secara umum, administrasi ialah tindakan bekerja sama dengan dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang produktif dan efisien. Menurut The Liang Gie (2007:14) administrasi merupakan

*“Seluruh rangkaian persiapan yang dilakukan untuk tugas utama yang diselesaikan oleh tim individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.”*

Definisi Administrasi menurut Luther Gullick,

*“Functioning as an administrator involves completing tasks and reaching established goals.”*

Administrasi berkaitan pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas. Nawawi (2003: 1), sebaliknya, mengartikan administrasi terdiri dari satu atau lebih langkah yang dimanfaatkan guna mengawasi usaha patungan sekelompok individu menuju tujuan yang telah ditentukan. Administrator menggambarkan administrasi sebagai proses kerjasama komprehensif yang mencakup dua individu atau lebih, yang didasarkan pada sejumlah alasan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Selain itu, terdapat ciri-ciri administratif lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau
2. lebih.
3. Adanya kerjasama.
4. Adanya proses usaha.
5. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
6. Adanya tujuan.

Pfiffner dan Presthus yang dikutip Inu Kencana (2010:13)

menggambarkan administrasi publik sebagai memberikan pertanggung jawaban penyelenggaraan negara dengan cara sebagai berikut:

1. Administrasi negara melibatkan pelaksanaan keputusan legislatif yang dibuat oleh otoritas dengan perwakilan politik.
2. Administrasi negara ialah pengkoordinasian tindakan kolektif dan individual untuk melaksanakan arahan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagian besar mengacu pada kegiatan rutin pemerintah.
3. Ringkasnya, Administrasi Negara ialah suatu prosedur yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, mengelola berbagai kemampuan dan metode, dan memberikan gambaran kepada banyak orang tentang arah dan tujuan.

Sedangkan sebagaimana dikemukakan oleh Chander dan Plano dalam Keban (2014:6), dikatakan bahwa:

*“Administrasi Publik ialah disiplin yang dikenal sebagai administrasi publik yang berhubungan dengan perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan sumber daya dan personel publik untuk membuat, melaksanakan, dan mengawasi keputusan publik.”*

Menurut Henry dalam Harbani Pasolong (2014:8), Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah berfungsi dalam masyarakat dan mendorong kebijakan publik yang lebih sadar sosial, administrasi publik merupakan sintesis kompleks antara teori dan praktik. Administrasi publik menurut para ahli di atas ialah usaha kolaboratif sekelompok orang atau organisasi untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan mencapai tujuan pemerintah.

### 1.5.3 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Harbani, 2010:39), setiap tindakan atau kelambanan yang diambil oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan publik.

Menurut Dye, kebijakan publik mencakup seluruh tindakan pemerintah dan bukan sekedar pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah pasti mempunyai maksud atau tujuan.

Menurut Chaizi Nasucha (dalam Harbani, 2010:39), kebijakan publik mengacu pada kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah untuk merumuskan undang-undang dan peraturan. Untuk merumuskan kebijakan yang membina hubungan sosial yang harmonis, strategi ini berupaya untuk mengasimilasi dinamika sosial masyarakat.

Menurut Nasucha, kebijakan diartikan sebagai berikut: kebijakan publik ialah tindakan memilih alternatif mana yang akan dilaksanakan pemerintah atau tidak demi kepentingan umum. Hal ini dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan. Kebijakan difokuskan pada kepentingan umum.

Kebijakan publik menurut Richard (dalam Leo Agustino, 2014: 7), merupakan suatu rangkaian panjang dari beberapa atau beberapa tindakan yang saling terkait yang berdampak pada orang-orang yang terlibat sebagai pilihan yang berbeda. Menurut penafsiran ini, kebijakan publik dan pelaksanaannya saling terkait meskipun penilaian yang dibuat berbeda.

Kebijakan publik menurut Nugroho mempunyai dua ciri: pertama, mudah dipahami karena jelas apa yang dimaksud dan bagaimana tindakan yang dilakukan

mencapai tujuan nasional; kedua, penilaiannya sederhana karena mudah untuk memastikan tingkat pencapaian tujuan.

Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) menegaskan bahwa kebijakan publik mengacu pada serangkaian inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai lembaga yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

### **1.5.3.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Tahap analisis kebijakan terdiri dari serangkaian proses berpikir yang dilakukan ketika melaksanakan kegiatan yang terutama bersifat politis. Untuk mengatasi suatu permasalahan publik, aktivitas politik ini digambarkan sebagai tahap pengambilan kebijakan dan direpresentasikan sebagai rangkaian langkah-langkah yang saling berhubungan dan disusun dalam urutan kronologis. Langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan meliputi penetapan agenda, persetujuan, penerapan, dan peninjauan kebijakan.

Wiliam Dunn (dalam Budi Winardo, 2007:32–34) mengidentifikasi tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda : rumusan masalah terjadi sepanjang proses penyusunan agenda. Perumus masalah dapat membantu dalam mengungkap asumsi-asumsi laten, mengidentifikasi akar permasalahan, menguraikan tujuan-tujuan yang memfasilitasi perpaduan sudut pandang yang berbeda, dan menciptakan pilihan-pilihan kebijakan baru.

2. **Formulai Kebijakan** : merupakan suatu proses yang merupakan bagian dari perumusan kebijakan dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan mengenai permasalahan di masa depan yang timbul dari keputusan yang diambil, termasuk tidak adanya tindakan. Pada tahap pengembangan kebijakan, hal ini telah selesai.
3. **Adopsi Kebijakan** : Adopsi suatu kebijakan disertai dengan rekomendasi. Hal ini memudahkan dalam menentukan eksternalitas dan dampaknya yang beragam, serta mengevaluasi tingkat risiko dan ketidakpastian, menetapkan standar untuk pengambilan keputusan, dan mengidentifikasi tugas administratif untuk menerapkan kebijakan.
4. **Implementasi** : Pemantauan merupakan komponen implementasi yang membantu perumusan kebijakan selama tahap implementasi. Pada setiap langkah implementasi kebijakan, pemantauan akan membantu menentukan tingkat kepatuhan, mengidentifikasi dampak buruk, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
5. **Evaluasi** : Ketika terdapat perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual suatu kebijakan, evaluasi dapat membantu memberikan informasi yang berharga bagi pembuatan kebijakan. Alhasil, hal ini memudahkan perumusan kebijakan pada tahap pengkajian kebijakan.

## **1.5.4 Evaluasi Kebijakan Publik**

### **1.5.4.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Sejumlah tujuan yang berasal dari kesulitan yang telah diidentifikasi sebelumnya dapat dicapai melalui proses penilaian kebijakan. Sebab tidak semua upaya kebijakan publik memberikan hasil yang diharapkan, evaluasi sangatlah penting. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui alasan yang mendasari kegagalan suatu kebijakan atau untuk menentukan apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan telah memberikan dampak yang diharapkan, karena kebijakan publik sering kali tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi kebijakan publik menurut Indiahono (2009:125) ialah proses mengevaluasi efektivitas inisiatif kebijakan dengan mempergunakan metrik yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika menganalisis kebijakan, indikator seringkali membuktikan apakah pelaksana program telah mematuhi seluruh aturan kebijakan secara konsisten di lapangan. karakteristik temuan yang dihitung (*output* dan *outcome*)

William N Dunn (dikutip Yusuf, 2008:472) Evaluasi identik dengan penilaian memberikan skor dan angka. Pembuatan informasi mengenai nilai atau keuntungan dari hasil kebijakan merupakan fokus evaluasi.

Anderson (dalam Winarno, 2007: 226) mendefinisikan penilaian kebijakan sebagai tugas yang melibatkan estimasi atau klasifikasi kebijakan dalam kaitannya dengan dampak, implementasi, dan isinya. Lester dan Stewart membagi pekerjaan penilaian kebijakan menjadi dua kategori. Langkah pertama ialah mengidentifikasi



dampak suatu kebijakan dengan menyatakan apa dampaknya. Upaya yang dilakukan untuk memastikan apakah upaya kebijakan publik mencapai tujuannya atau mempunyai dampak yang diharapkan disebut sebagai pekerjaan awal ini. Fase kedua melibatkan penentuan tergantung pada standar atau kriteria yang sudah ada sebelumnya, apakah suatu kebijakan efektif atau tidak. Dengan menjelaskan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi, kita dapat menentukan implikasi kebijakan dan menentukan apakah program kebijakan yang dilaksanakan sejalan dengan dampak yang diantisipasi. Terdapat hubungan erat antara tugas pertama dan kedua dalam evaluasi kebijakan.

Lester dan Stewart yakin penulis mengambil peran pertama karena mencakup penilaian apakah inisiatif kebijakan publik mencapai tujuan yang diharapkan atau memberikan dampak yang diinginkan, Lester dan Stewart berpendapat bahwa penulis harus mempunyai peran utama. Penulis ingin tahu mengenai efektivitas *Antenatal care* dan *Nifas* dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. melibatkan penentuan

Tyler 1950 (dalam Yusuf 2008: 3) menyatakan bahwa evaluasi ialah suatu prosedur yang dimanfaatkan guna memastikan sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dipenuhi.

#### **1.5.4.2 Tujuan Evaluasi**

Evaluasi berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan dengan mengukur atau membandingkan dampak suatu program dengan hasil yang diinginkan.

Menurut Subarsono (2015), tujuan evaluasi ialah sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja satu kebijakan. Evaluasi memungkinkan

mempelajari bagaimana kinerja program telah dilaksanakan.

2. Menentukan seberapa efektif suatu kebijakan. Kita dapat memastikan kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan melalui penilaian.
3. Menentukan jumlah *output* atau hasil suatu kebijakan. Salah satu tujuan penilaian ialah untuk mengukur sejauh mana dan kualitas keluaran suatu kebijakan.
4. Mengevaluasi dampak suatu kebijakan. Tujuan lain dari evaluasi ialah untuk menentukan apakah program mempunyai dampak yang menguntungkan atau negatif.
5. Untuk melihat apakah ada sesuatu yang tampak di luar kebiasaan. Melalui peninjauan, kami dapat menentukan apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau menyimpang dari tujuan tersebut.

#### **1.5.4.3 Pendekatan Evaluasi**

Tugas evaluasi dan pelaksanaannya merupakan strategi evaluasi; dengan kata lain, pendekatan evaluasi mengacu pada tujuan dan metode evaluasi. Setiap metode penilaian menawarkan panduan tentang cara mengumpulkan data yang dapat dipergunakan dalam berbagai situasi untuk mengumpulkan data penting. Brian M. Stecher dan W. Alan Davis (dalam Yusuf, 2008: 22) membagi strategi menjadi enam bagian, yaitu sebagai berikut:

##### **A. Pendekatan Experimental**

Penilaian yang berfokus pada penggunaan penelitian eksperimental dalam program evaluasi dikenal dengan pendekatan eksperimental.

Dengan menyesuaikan sejumlah mungkin variabel dan berfokus hanya pada pengaruh program, metode ini berupaya menarik generalisasi luas mengenai dampak program. Manfaat metode ini ialah memberikan hasil yang relatif obyektif dan dapat diterapkan pada permasalahan program yang ada.

B. Pendekatan yang berorientasi pada Tujuan

Pendekatan ini mengukur dan menentukan keberhasilan berdasarkan tujuan program. Berbeda dengan teknik eksperimen yang keberhasilannya ditentukan oleh program lain atau kelompok kontrol, di sini keberhasilan ditentukan oleh kriteria program tertentu.

C. Pendekatan yang berfokus kepada keputusan

Pendekatan yang memprioritaskan pengambilan keputusan menyoroti kebutuhan yang berbeda dari para pengambil keputusan dan semakin besarnya pengaruh mereka terhadap keputusan program. Kelemahan pendekatan ini ialah banyak penilaian penting yang diambil pada waktu yang salah. Banyak penilaian sering kali dibuat berdasarkan keinginan pribadi, politik, sentimen, dan persepsi, bukan berdasarkan fakta.

D. Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai

Pendekatan ini berfokus informasi yang mungkin berguna bagi pengguna program dan berfokus pada interaksi mereka dengan program tersebut. dan kelemahan metode ini ialah bergantung pada kelompok yang sama.

#### E. Pendekatan yang Responsif

Pendekatan responsif ialah strategi yang melihat permasalahan dari semua sudut pandang, mulai dari peserta hingga peserta program. Teknik ini memiliki keuntungan karena peka terhadap sudut pandang lain dan mengakomodasi pemikiran yang kabur dan kurang penekanan. Keterbatasan dalam daya tanggap mencakup ketidakmampuan untuk mempertimbangkan semua sudut pandang dari berbagai kelompok, sehingga pengambil keputusan harus memprioritaskan atau menyederhanakan informasi.

#### F. *Goal Free Evaluation*

*Goal Free Evaluation* tidak terfokus pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, tujuan tersebut hanya bersifat seremonial dan diarahkan pada keadaan yang ada.

Berdasarkan tujuan merupakan landasan keberhasilan suatu kebijakan, penulis mengadopsi pendekatan berorientasi tujuan berdasarkan metodologi evaluasi yang telah dibahas sebelumnya.

#### **1.5.4.4 Fungsi Evaluasi**

Wibawa menyatakan (dalam Riant, 2008:477) bahwa penilaian kebijakan publik memiliki 4 tujuan:

1. Eksplanasi Bali. Hasil penilaian dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang cara berbagai komponen realitas berinteraksi, yang dapat menjadi gambaran realitas pelaksanaan program. Penilaian ini memungkinkan penilai untuk menunjukkan dengan tepat

permasalahan, keadaan, dan orang-orang yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi, Baik atau tidaknya tindakan yang dilakukan birokrat dapat diketahui kaitannya dengan apakah mereka mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.
3. Audit. Melalui peninjauan, untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau kelainan, atau apakah keluarannya benar-benar sampai ke kelompok sasaran kebijakan.
4. Akunting. Dapat memastikan implikasi sosial-ekonomi dan kebijakan melalui penilaian.

#### 1.5.4.5 Konsep Evaluasi Kebijakan

**Tabel 1.4**  
**Konsep Evaluasi Kebijakan**

Pendekatan (1)	Tujuan (2)	Asumsi (3)	Bentuk- Bentuk Utama (4)	Teknik (5)
Evaluasi Semu	Mempergunakan metode deskriptif guna memperoleh informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	Eksperimentasi sosial, Akuntansi sistem sosial, Sintesis riset dan praktik.	Sajian grafik. Tampilan tabel. Angka indeks. Analisis seri waktu terinterupsi. Analisis seri terkontrol, Analisis diskontinuregrsi.

Pendekatan (1)	Tujuan (2)	Asumsi (3)	Bentuk- BentukUtama (4)	Teknik (5)
Evaluasi Formal	Mempergunakan metode deskriptif guna memperoleh informasi yang tercapai dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.	Tujuan dan sasaran pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Evaluasi perkembangan Evaluasi Eksperimental. Evaluasi Proses retrospektif Evaluasi hasil retrospektif.	Pemetaan sasaran. Klarifikasi nilai. Kritik nilai. Pemetaan hambatan Analisis dampak silang
Evaluasi Keputusan Teoritis	Mempergunakan teori deskriptif guna memperoleh informasi yang terpercaya dan valid mengenalkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas multiatribut.	Brainstorming Analisis argumentasi delphi kebijakan. Analisis survei pemakai
	hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.		

Penelitian ini berfokus pada strategi penilaian semu berdasarkan metodologi evaluasi yang disebutkan di atas karena mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya

mengenai hasil program.

#### 1.5.4.6 Tipe Evaluasi Kebijakan

Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa et al., 1994: 74–75) menyatakan bahwa ada 4 tipe evaluasi:

1. *Single program after only*, ialah semacam evaluasi yang setelah melihat setiap variabel yang dijadikan kriteria program, memvalidasi keadaan atau penilaian program. Akibatnya, penelitian ini tidak dapat menentukan apakah reaksi kelompok sasaran terhadap program tersebut positif atau negatif.
2. *Single program before-after*, merupakan perbaikan dari jenis pertama, artinya tersedia informasi mengenai tujuan program sebelum dan sesudah program dilaksanakan.
3. *Comparative after only*, merupakan perbaikan dari penilaian kedua namun bukan penilaian pertama, dan studi ini hanya mempertimbangkan skenario yang diinginkan.
4. *Comparison before-after*, menggabungkan ketiga desain untuk memberikan informasi tentang bagaimana program mempengaruhi khalayak yang dituju.

Kajian ini berfokus pada jenis penilaian *Single program after only* berdasarkan jenis evaluasi tersebut di atas karena program ini mempergunakan karakteristik seperti efektivitas, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan akurasi sebagai kriteria program.

### 1.5.4.7 Model Evaluasi

#### 1.5.4.7.1 Model Evaluasi Wiliam N. Dunn

Menurut William N. Dunn (dalam Riant, 2008: 473), model evaluasi menyatakan bahwa perolehan informasi mengenai manfaat atau manfaat dari hasil kebijakan menjadi tujuan utama penilaian. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada nilai-nilai yang evaluasi berfungsi untuk menganalisis dan memperjelas. Hal ini membantu penggunaan metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan saran. Dalam kaitannya dengan kinerja kebijakan, evaluasi memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai seberapa banyak tindakan publik yang telah dicapai dalam hal kebutuhan, nilai, dan kemungkinan. Karena penilaian kebijakan mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan, penekanan utamanya ialah pada efektivitas kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi program publik. Proses perumusannya lebih dievaluasi dibandingkan substansi kebijakannya, yakni pada sisi pasca aksi. Penilaian ini biasanya menentukan apakah proses tersebut telah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik berikut:

**Tabel 1.5**  
**Model Evaluasi Wiliam N. Dunn**

Tipe Kriteria (1)	Pertanyaan (2)	Ilustrasi (3)
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?	Biaya tetap. Efektifitas tetap.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferens, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsisten dengan survei warga negara.



Ketepatan	Apa hasil (Tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien.
-----------	--	--

Sumber: Wiliam N Dunn (dalam Riant, 2008:473)

a. Efektifitas

Winarno (2007: 184) menyatakan bahwa kata efektivitas berasal dari kata efektivitas yang berarti pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil utilitas ialah istilah lain untuk efektivitas. Kaitan antara hasil yang diantisipasi dan hasil aktual selalu menjadi faktor efektivitas. Semakin banyak tujuan kebijakan yang dicapai atau terlampaui, semakin sukses kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dapat dikatakan gagal jika setelah diberlakukan ternyata dampaknya tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Namun, ada situasi di mana kebijakan publik memerlukan waktu untuk membuahkan hasil dan terkadang tidak langsung berjalan dengan baik.

b. Kecukupan

Sesuai dengan penegasan Winarno (2007: 186), kebijakan publik dianggap memadai jika tujuan yang dicapai dalam beberapa aspek dianggap memadai. Kecukupan (adequacy) berkenaan sejauh mana suatu tingkat efektivitas dapat memenuhi kemungkinan, nilai, atau kebutuhan yang melahirkan masalah.

c. Responsivitas

Sesuai interpretasi Winarno (2007: 189), Responsivitas dalam

kebijakan publik mengacu pada cara sasaran kebijakan publik bereaksi terhadap suatu kegiatan, yaitu pelaksanaan kebijakan.

Responsivitas berkenaan kemampuan suatu program atau kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan, kepentingan, atau keyakinan kelompok masyarakat tertentu. Kemanjuran program dan kebijakan dapat dievaluasi dengan melihat bagaimana khalayak yang dituju merespons pelaksanaannya, yang ditentukan dengan mengantisipasi pengaruh kebijakan dan mengukur respons setelah kebijakan tersebut diterapkan. Penerimaan dan penolakan mungkin ditawarkan sebagai reaksi yang diinginkan.

d. Ketepatan

Menurut Winarno (2007 : 189), ketepatan sebagai nilai atau biaya dari tujuan program serta keandalan asumsi yang mendasarinya. Menyelesaikan beberapa pilihan untuk dipergunakan sebagai rekomendasi melibatkan penentuan apakah hasil dari alternatif yang disarankan mewakili serangkaian tujuan yang bisa diterapkan.

### **1.5.5 Governance**

Fokusnya ialah upaya menyusun, menggambarkan, mendisain, atau membuat organisasi berjalan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan secara maksimal. Menurut Ikeanyibe (2017, hal. 6) berpendapat bahwa penyedia layanan bertugas menggerakkan sementara pemerintah yang mengatur dan mengoordinasikan. Gibson dalam Ikeanyibe (2017, hal. 7) juga berpendapat bahwa

governance melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, seperti sektor publik, dan sektor swasta.

Menurut Denhardt dan Denhardt dalam Ahmad (2012, hal. 8) menjelaskan menggambarkan evolusi paradigma administrasi publik yang meliputi good governance, new public management (NPM), old public Administration (OPA), dan new public service (NPS).

### **1.5.6 Kebijakan Publik**

Eyston (1971:18) dalam Solichin Abdul Wahab (2015:13) merumuskan kebijakan publik sebagai "*the connection between a governmental entity and its surroundings*" (sebuah hubungan diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Thomas R. Dye (1987:1) Menurut Solichin Abdul Wahab (2015:14), kebijakan publik ialah "*whatever actions governments decide to take or not take*" (yaitu, tindakan apa pun yang mereka pilih untuk dilakukan).

James E. Anderson (1970) dalam Sahya Anggara (2014) mendefinisikan kebijakan publik, "Policy developed by governmental bodies and officials is referred to as public policy." (Kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah disebut sebagai kebijakan publik).

Lemieux (1995:7) dalam Solichin Abdul Wahab (2015:15), seorang pakar Prancis, merumuskan kebijakan publik sebagai:

*"The outcome of political players' systematic relationship-building efforts to address environmental public issues. The whole procedure changes with time"*  
(Hasil dari upaya membangun hubungan sistematis para pemain politik untuk

mengatasi permasalahan lingkungan hidup masyarakat. Seluruh prosedur berubah seiring waktu).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dan menegakkan hak-haknya dalam hal-hal yang menjadi perhatian publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Dunn (2004) dalam Yeremias (2014:67) terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses kebijakan yaitu :

1. Penetapan agenda kebijakan

Tahap ini proses mengidentifikasi permasalahan masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Hakikat permasalahan ditentukan melalui problem structuring.

2. Formulasi kebijakan

Pada tahap ini, menentukan beberapa pilihan kebijakan dan dampak dari pilihan tersebut jika dipilih, atau melaksanakan apa yang disebut dengan forecasting.

3. Adopsi kebijakan

Tahap ini ialah di mana administrator dan legislator akan membantu penetapan kebijakan. Penentuan akan tahap ini dapat dilakukan setelah melalui proses rekomendasi.

4. Implementasi kebijakan

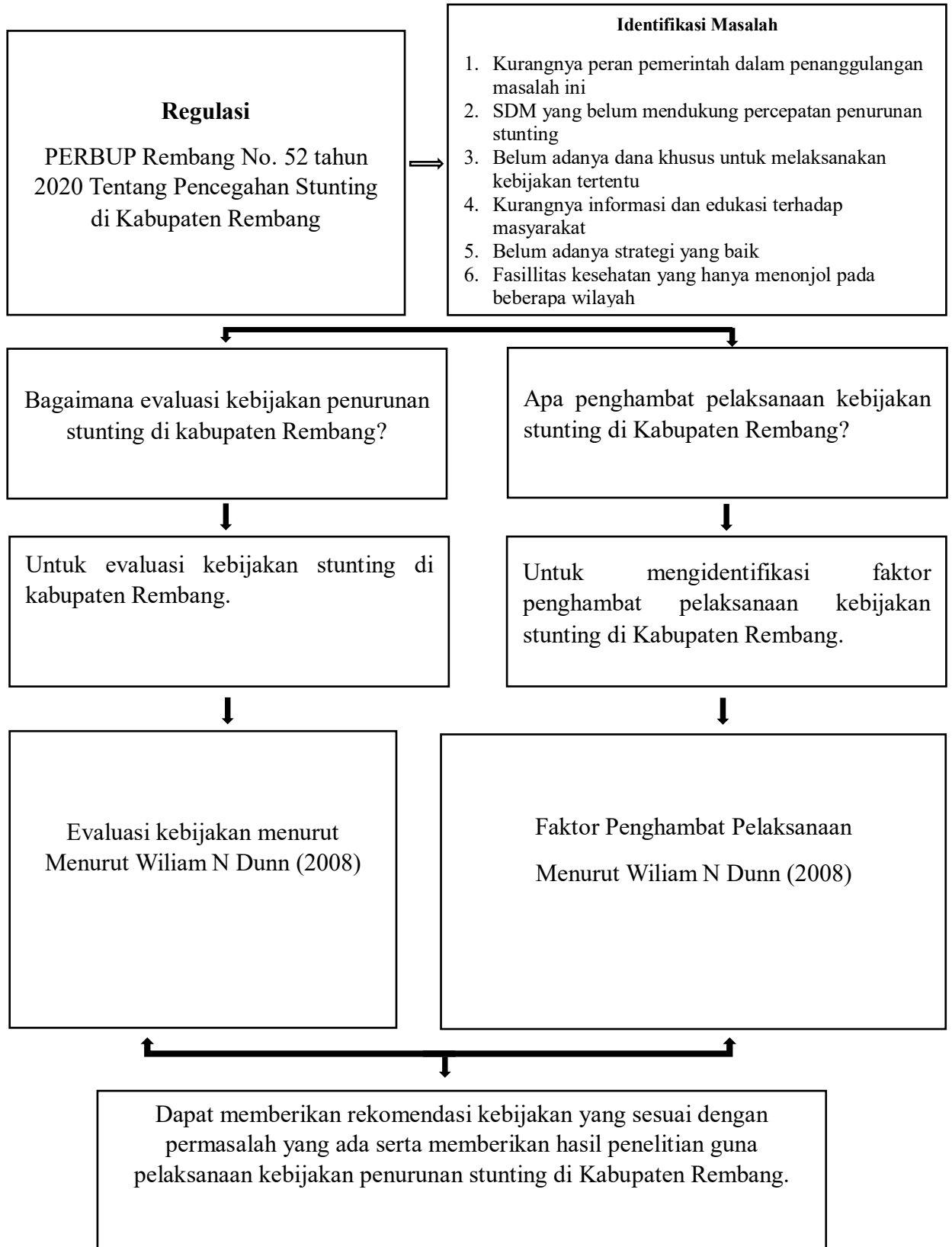
Khususnya, mengatur dan memanfaatkan uang dan sumber daya yang sudah ada untuk melaksanakan tahap implementasi kebijakan yang dipilih. Pada titik ini, prosedur pemantauan selesai.

#### 5. Penilaian kebijakan

Tahap ini ialah tahap penilaian terhadap pelaksanaan proses implementasi yang dilakukan. Proses evaluasi dilakukan pada tahap ini.

## 1.6 Kerangka Berpikir

**Tabel 1.6**  
**Kerangka Berpikir**



## **1.7 Operasional Konsep**

### **1.7.1 Pengertian Stunting**

Stunting ialah seorang anak dianggap kekurangan gizi kronis jika, akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan, tinggi badannya di bawah rata-rata anak seusianya. Nilai Z untuk balita yang kurang dari -2SD dianggap pendek, dan yang kurang dari -3SD dianggap sangat pendek. Bila panjang atau tinggi badan balita dihitung berdasarkan umurnya dan dibandingkan dengan batasan standar WHO, maka balita tersebut termasuk pendek.

Banyak orang yang hanya menerima begitu saja tinggi badan anak yang kecil tanpa mengambil tindakan pencegahan karena sering kali diyakini merupakan sifat turun-temurun (genetik) yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Pada kenyataannya, sejauh yang kita ketahui, faktor-faktor yang menentukan perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik), dan layanan kesehatan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap kesehatan dibandingkan genetika. Stunting mempengaruhi pengetahuan dan penyerapan kognitif selain terlihat pada struktur tubuh.

**Tabel 1.7**  
**Operasional Konsep Evaluasi Kebijakan**

<b>Fokus</b>	<b>Gejala</b>	<b>Sub Gejala</b>
Mengevaluasi kebijakan stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian tujuan program yang dilaksanakan</li> <li>2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan stunting di Kabupaten Rembang</li> <li>3. Keoptimalan kebijakan yang telah dilaksanakan</li> </ol>
	Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan yang dibuat dan tingkat perhatian pemerintah dalam merespon masalah stunting.</li> <li>2. Penanganan stunting melalui kerjasama antar lembaga dan instansi pemerintah</li> <li>3. Sejauh mana penguatan kelembagaan</li> </ol>
	Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan dalam pencapaian tujuan evaluasi kebijakan stunting</li> <li>2. Pendistribusian kebijakan secara adil dan merata pada setiap wilayah</li> <li>3. Ketersediaan sarana, prasarana, dan sumberdaya</li> </ol>
	Ketepatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemanfaatan program yang dirasakan oleh kelompok sasaran/penerima manfaat</li> <li>2. Ketepatan jumlah penerima atau kelompok sasaran kebijakan</li> <li>3. Peningkatan fungsi kebijakan yang telah diberikan kepada sasaran</li> </ol>

### 1.7.2 Faktor-Faktor Penyebab Stunting

1. Pola makan ibu sebelum dan selama hamil Untuk anak balita, stunting didefinisikan sebagai ketidakmampuan tumbuh kembang dalam jangka waktu lama, dimulai pada saat hamil (yaitu 1000 HPK). Ketika seorang wanita tidak sehat, penyakitnya mempunyai dampak yang signifikan terhadap nutrisi janinnya selama kehamilan. Kondisi ini menyerang anak usia 0 - 6 bulan hingga 6 hingga 24 bulan dan seterusnya, hingga anak



berusia lima tahun. Ibu hamil lebih rentan mengalami gejala stunting karena beberapa faktor kesehatan, seperti anemia, gizi buruk, atau kekurangan energi kronis (KEK).

2. Nutrisi dan konsumsi bayi baru lahir antara usia 0 dan 6 bulan dan antara 6 dan 24 bulan. Berat dan panjang bayi baru lahir membuktikan perkembangan gizinya. Bayi kerdil mungkin dilahirkan karena berbagai alasan. Menurut Stewart dkk, “praktik pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak mencukupi erat kaitannya dengan kurangnya asupan gizi.” MP - Faktor-faktor berikut menyebabkan ASI tidak mencukupi:
  - a. Kualitas pangan yang kurang disebabkan oleh anti nutrisi, kurangnya nutrisi hewani, dan MP (ASI) dengan energi dan nilai gizi yang rendah.
  - b. Praktik pemberian makan yang tidak tepat, antara lain memberikan makanan berkualitas buruk saat sakit dan menyajikan dalam jumlah yang tidak sesuai dengan berkurangnya nafsu makan seseorang.
  - c. Keamanan pangan dan air dipengaruhi oleh penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak tepat, serta kombinasi makanan dan air. Sementara itu, menyapih terlalu dini, tidak eksklusif, tidak mempergunakan Inisiasi Keperawatan Dini (IMD), dan menyusui yang tidak tepat.
3. Cakupan pelayanan kesehatan lingkungan: Lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor penghambat tumbuh kembang anak; ini

karena kesehatan ibu. Kurang dari 40% keluarga di Provinsi Aceh mencuci tangan dengan sabun dan air, dan sekitar 20% rumah tangga buang air besar di luar. Perilaku ini ialah contoh dari lingkungan internal. Menurut Menteri Kesehatan, berikut penyebab terjadinya stunting: Dalam penafsiran berbeda, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan beberapa penyebab terjadinya stunting:

- 1) Akar masalah : a. Kemajuan ekonomi, politik, dan sosial budaya ialah akar permasalahan yang pertama. b. Pendidikan, gizi, ketahanan pangan, dan kemiskinan c. Akses terhadap pengetahuan, pangan, jasa, dan daya beli.
- 2) Penyebab tidak langsung meliputi: a) ketersediaan pangan dan kebiasaan konsumsi; b) Pemberian MP-ASI, pola asuh psikososial, ketersediaan ASI, serta kebersihan dan sanitasi. c). Pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan.
- 3) Penyebab langsung :
  - a. Konsumsi makanan
  - b. Status infeksi.

**Tabel 1.8**  
**Operasional Konsep Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan**

<b>Fokus</b>	<b>Gejala</b>	<b>Sub Gejala</b>
<b>Mengevaluasi faktor penghambat evaluasi kebijakan stunting di Kabupate Rembang</b>	Waktu Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlambatan penanganan dan kebijakan guna penurunan angka stunting di Kabupaten Rembang</li> <li>• Waktu yang kurang efisien dengan perkembangan usia anak yang menjadi sasaran</li> </ul>
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya suplai bahan pangan guna meminimalisir perkembangan stunting</li> </ul>
	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola komunikasi yang tidak terarah dan satu pintu menyebabkan keterlambatan penanganan ibu risiko tinggi stunting.</li> <li>• Komunikasi tim yang kurang maksimal menyebabkan terhambatnya informasi yang didapatkan oleh sasaran</li> </ul>
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur birokrasi dalam nanganan yang belum jelas</li> <li>• Layanan kesehatan yang sulit dijangkau dari tempat tinggal</li> <li>• Rasa tidak nyaman saat diperiksa</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi</li> </ul>

### **1.8 Argumen Masyarakat Faktor Sosial Ekonomi**

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa yang dibahas yaitu tentang strategi dan program dalam penurunan stunting di Kabupaten Rembang untuk mengetahui faktor kendala dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Rembang. Setiap peneliti memiliki fokus masing-masing pada

penelitiannya. Oleh karena itu, diperlukan konsep dan ide yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Dilihat dari segi manajemen publik belum ada penelitian yang mengkaji tentang studi evaluasi program pada penurunan stunting di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu peneliti sendiri akan membahas tentang studi evaluasi program dengan mempergunakan evaluasi model illuminatif yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan DINSOSPPKB Kabupaten Rembang untuk menentukan langkah selanjutnya. Waktu pelaksanaan, komunikasi, sikap dan perilaku, serta struktur birokrasi yang mana merupakan faktor penentu keberhasilan suatu evaluasi kebijakan ini. Jika 4 faktor ini dalam pelaksanaannya kurang memadai maka akan menghambat keberlangsungan suatu kegiatan.

### **1.9 Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian pada penelitian ini menggunakan evaluasi kebijakan yang mengambil dari beberapa faktor atau indikator berhasilnya suatu kegiatan menurut George C. Edwards III seperti Komunikasi, sumber daya manusia, sikap dan perilaku, seerta struktur birokrasi sebagai fokus pelaksanaan kegiatan. Hal ini didasarkan pada fokus yang akan diteliti untuk mendukung Evaluasi kebijakan stunting di Kabupaten Rembang. Terdapat 4 faktor penghambat yang menjadi penyebab utama tidak tercapainya penurunan angka kelahiran baru stunting di Kabupaten Rembang.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dengan mempergunakan metodologi deskriptif ialah metodologi yang dipergunakan. Dengan mempergunakan solusi terhadap isu-isu yang dibahas, pendekatan ini menggambarkan dan mendiskusikan kejadian atau isu terkini. Menurut Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2006), penelitian kualitatif ialah setiap penelitian yang mengacu pada landasan ilmiah, melaksanakan banyak metodologi terkini, dan mencoba memahami suatu fenomena yang terjadi. Upaya yang dilakukan untuk mengkarakterisasi suatu fenomena sosial yang ada di publik melalui penelitian deskriptif kualitatif ini. Dampak implementasi kebijakan terhadap pencegahan stunting sedang diteliti di Kabupaten Rembang. *Purposive sampling* merupakan metode yang dipergunakan dalam riset ini untuk memilih informan.

Kelompok peserta yang berpengetahuan diambil dari mereka yang benar-benar memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Informasi penelitian ini diberikan oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Rembang, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dan Pemberdayaan Wanita Keluarga Berencana. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan. Untuk mengetahui kebenaran data peneliti mempergunakan teknik triangulasi dan referensi jelas. Selanjutnya dilakukan reduksi data, visualisasi data, validasi data, dan penarikan kesimpulan disertai konfirmasi untuk menguji data yang diperoleh.

### **1.10.2 Situs Penelitian**

Sesuai dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Stunting Di Kabupaten Rembang” maka penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Individu, lokasi, atau benda yang dilihat oleh sasaran pemeriksaan merupakan subjek penelitian dalam penelitian ini (referensi Kata Bahasa Indonesia, 1989: 862). Orang atau organisasi yang mungkin menjadi informan penting untuk penelitian menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. Oleh karena itu, purposive sampling ialah metode yang dimanfaatkan guna mengidentifikasi informan penting. Sugiyono (2016) mendefinisikan purposive sampling sebagai strategi pengambilan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu saat memilih sumber data. Oleh karena itu, berikut ialah topik penelitian untuk penelitian ini:

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
2. Balai Penyuluh Kecamatan Rembang
3. Stakeholder yang terlibat dalam kebijakan program stunting
4. Masyarakat yang terkait penelitian

### **1.10.4 Jenis Data**

Jenis data menurut Patton (Emzir, 2010) ada tiga kategori data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif meliputi observasi, dokumen, dan wawancara. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif

dari wawancara informan, observasi langsung yang ditangkap dalam bentuk gambar, dan dokumentasi dari publikasi jurnal sebelumnya.

#### **1.10.5 Sumber Data**

Sumber data primer penelitian ini ialah wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Sumber data sekunder meliputi data jurnal, artikel, DINSOSPPKB Kabupaten Rembang, dan bahan bacaan online terkait topik penelitian.

#### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada dikenal dengan pendekatan pengumpulan data. Ada tiga macam strategi pemilahan informasi, khususnya observasi/pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Alasan observasi/pengamatan secara langsung ialah untuk menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung di lapangan dan persepsi langsung terhadap sumber-sumber data di lokus penelitian.

#### **1.10.7 Teknik Pemilihan Informan**

Menurut Sugiyono (2012:52), peneliti dapat mengidentifikasi informan dalam penelitian kualitatif dengan masuk ke dalam konteks sosial tertentu, mengumpulkan observasi, dan berbicara dengan orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang subjek tersebut. Orang yang memberikan data dipilih dengan sengaja, artinya mereka dipilih dengan mempertimbangkan tujuan dan kepentingan tertentu. dan akan dikembangkan melalui teknik *snowballing*, di mana peneliti menemukan individu tambahan yang dinilai lebih berpengetahuan dan mampu melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua sampel pertama.

Hal ini terjadi karena data yang diberikan oleh kedua sampel tersebut tidak lengkap. model sebelumnya. Begitu seterusnya, menambah jumlah sampel. Sementara itu, temuan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terbatas pada konteks sosial tertentu.

Kedua fase yang penulis uraikan di bawah ini mungkin bisa dijadikan sebagai strategi untuk mencari informan penelitian ini:

1. Melalui keterangan orang yang berwenang

Cara ini dapat dipergunakan secara informal (oleh tokoh masyarakat seperti kepala adat dan lainnya) atau secara resmi (oleh pemerintah).

2. Melalui wawancara pendahuluan

Informan memainkan peran penting bagi peneliti dalam pekerjaan mereka. Untuk dapat memenuhi syarat sebagai informan penelitian, seseorang harus memenuhi beberapa kualifikasi. Menurut Moleong 2007 (dalam Andi Prastowo 2012; 1960), seseorang harus memenuhi lima kriteria agar dapat memenuhi syarat sebagai informan:

- a. Orang harus dapat dipercaya dan jujur.
- b. Memiliki kepatuhan terhadap peraturan
- c. Orang ini banyak bicara dan sama sekali tidak sulit diajak bicara, lebih banyak diam.
- d. Menolak untuk membiarkan peserta dari kelompok lawan mana pun berada di lingkungan belajar
- e. Individu yang memiliki perspektif tertentu terhadap kejadian yang terjadi



Berdasarkan persyaratan yang disebutkan di atas, peneliti melaksanakan evaluasi dalam wawancara ini.

#### **1.10.8 Kualitas Data**

Berikut data yang penulis berikan dalam penelitian ini:

- Data informasi valid yang membuktikan tingkat kesesuaian antara data yang dikumpulkan analisis dan data yang benar-benar terjadi pada item tersebut.
- Data informasi realible yang dapat dipercaya mengenai tingkat konsistensi/kemantapan informasi dalam rentang waktu tertentu.
- Data informasi obyektif sehubungan dengan pengaturan antara banyak individu. Artinya semakin banyak individu yang memberikan informasi serupa, maka pada saat itu informasi tersebut menjadi informasi yang objek